

JURNAL ILMIAH

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB DALAM
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI LOMBOK UTARA**



Di susun oleh:

**AHMAD SAHDELI
D1A112020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2018

Halaman Pengesahan Pembimbing

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB DALAM
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI LOMBOK UTARA**



Oleh :

AHMAD SAHDELI
D1A112020

Menyetujui;

Mataram,

Pembimbing utama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lubis", written over a horizontal line.

Lubis, SH., M. Hum
NIP.19590828 198703 1 002

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI LOMBOK UTARA**

Ahmad Sahdeli

D1A112020

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar di Lombok Utara dan apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis, dan teknik pengumpulan data ini adalah studi pustaka/studi dokumen dan wawancara/ interview. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB melakukan perannya dalam pencegahan melakukan upaya preventif dan upaya represif. Sedangkan kendala yang di hadapi dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan masih kurang karna terkendala dengan sarana dan prasarana yang dianggap masih belum memadai.

Kata kunci: Badan Narkotika Nasional, pencegahan dan penanggulangan, tindak pidana Narkotika.

***THE ROLE OF NATIONAL NARCOTICS BOARDS IN THE PREVENTIVE
NARCOTICS CRIMINALS CONDUCTED BY STUDENTS IN NORTH
LOMBOK***

This research conducting to know how are the role of national narcotics board Province West Nusa Tenggara in order to prevent narcotis criminal which conducted by students in North Lombok and what are the obstacles to prevent the narcotics crimes by student. The methode of this research is normative-empiric, which using statute, conceptual and sociological approaches. The data collected by library or documents study and interview. Based on this research, that national narcotics board province of west nusa tenggara play his role in preventive area and represif means. The obstacle that face by national narcotics board in preventive efforts are mainly because of the lack of facilities and infrasructure.

Keywords : National Narcotic Board, Preventions, and Narcotic Crimes

I. PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai tindakan-tindakan yang dilarang terkait Narkotika. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang tepat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika, karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat bangsa, dan negara.

Narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan tidak hanya disalahgunakan oleh orang kaya saja melainkan penyalahgunaan narkotika saat ini sudah mulai masuk ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di perkotaan maupun di perdesaan apalagi mulai mengancam mahasiswa, pelajar SMA bahkan pelajar setingkat SMP dan korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi muda cukup di bilang mengkhawatirkan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.¹

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika LN No. 143 2009 TLN No.5062

Mengingat di kabupaten Lombok Utara sendiri belum didirikannya Badan Narkotika Kabupaten, jadi yang berperan dalam pencegahan dan penanggulangan Narkotika digantikan oleh penyidik polisi.

Dalam hal ini sebagai mana Lombok Utara merupakan kabupaten yang baru-baru ini berdiri dan merupakan kawasan wisata yang banyak dikunjungi oleh warga lokal maupun warga asing sehingga untuk mengontrol mobilitas warga lokal dan wisatawan asing masih belum bisa terkontrol sehingga hal ini berpengaruh terhadap kriminalitas termasuk di dalamnya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika itu sendiri.

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka permasalahan yang diangkanndlam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1). Bagaimana peran BNN Provinsi dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar di Lombok utara?, 2). Apa saja kendala yang BNN Provinsi NTB dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh pelajar di Lombok utara?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB dalam pencegahan dan penanggulanagn tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar di Lombok utara, 2). Untuk mengetahui kendala Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar di Lombok utara.

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1). Secara akademis, merupakan syarat untuk mencapai S-1 pada program studi ilmu hukum di Universitas Mataram, 2). Manfaat teoritis penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana, 3).manfaat praktis memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya Badan Narkotika Provinsi NTB di dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana Narkotika.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu menggabungkan dua pendekatan yaitu, mempelajari Pasal-Pasal perundangan, pendapat para ahli, lalu mengurainya menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif untuk mengolah dan menganalisa data-data yang diperoleh di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan. Jenis data yaitu data primer, skunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi pustaka dan wawancara/interview. Analisis data setelah data yang diperoleh sesuai dengan teknik dan alat pengumpulan data, maka data yang terkumpul kemudian diolah dan di analisis dengan metode kuantitatif.

II. PEMBAHASAN

Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Lombok Utara

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.³

Berdasarkan hasil Wawancara dengan bapak Irfan selaku kasi pencegahan BNN Provinsi menyatakan bahwa upaya pencegahan BNN Provinsi NTB menggunakan 3 sistem sasaran yaitu:⁴ 1). Primer yaitu upaya sosialisasi terkait pencegahan yang menunjuk kepada orang yang dianggap belum tau tentang Narkotika, seperti anak-anak usia sekolah seperti siswa SD,SMP dan SMA yang dianggap belum mengetahui tentang Narkotika. Selanjutnya diberikan penyuluhan tentang bahaya Narkotika seperti apa dan diharpkan agar tidak melakukan kegiatan untuk mencoba-coba Narkotika. Adapun sekolah yang sudah diberikan sosialisasi dengan antara lain

² R. Suyoto bakir, *kamus lengkap bahasa Indonesia*, Tangerang; karism Publishing Grup,2009, hlm 348.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta; Rajawali Press, 2002, hlm.242

⁴ Bapak Ifan,selaku kasi pencegahan BNN Provinsi NTB, mataram selasa 21-12-2017

Sekolah dasar yang ada di tanjung, di gangga, dan SMP dan SMA yang berada di tanjung, Gangga, pemenang dan sekolah yang ada di Lombok Utara. 2). Skunder yaitu upaya pencegahan yang mengarah kepada sekelompok orang yang memang sedang atau masih menggunakan narkoba. Dengan cara diberikan penyuluhan, pengarahan, maka selanjutnya akan mengetahui dampaknya, lalu diharapkan dapat menyadarkan hingga menghentikan pemakaian narkoba. 3). Tersier yaitu upaya pencegahan yang mengarah bagi orang yang sudah selesai memakai narkoba. Artinya pecandu yang sudah menjalankan rehabilitasi akan tetap diawasi oleh BNN untuk mengantisipasi, karena sesungguhnya tidak ada kata sembuh bagi seorang mantan penyalahgunaan, yang ada hanya memulihkan saja. Suatu saat orang tersebut bisa saja menyalahgunakan Narkoba kembali. Dalam hal ini BNN Provinsi akan terus mendampingi untuk mencegah terjadinya pemakaian kembali. Mantan pecandu akan diberikan pelatihan berupa ketrampilan dalam berwiraswasta serta di berikan modal berupa alat atau barang pokok untuk mengembangkan usahanya. Tidak hanya sebatas itu, mantan pecandu ini tetap akan di pantau dalam kesehariannya dan diharapkan menjadi contoh yang baik kepada orang yang masih terjerumus Narkoba, bahwa ia masih bisa di terima oleh masyarakat tentunya dengan mengerjakan hal yang positif.

Adapun upaya yang dilakukan BNNP NTB dalam pencegahan tindak pidana narkoba di Lombok Utara adalah sebagai berikut:⁵ 1). Dilakukannya Sosialisasi di kalangan sekolah-sekolah yang ada di Lombok utara seperti SMPN 1 Tanjung, SMPN 1 Gangga, SMPN 1 Kayangan, SMAN 1 Pemenang, SMAN 1 Tanjung,

⁵ Bapak Ifan, selaku kasi pencegahan BNN Provinsi NTB, mataram selasa 21-12-2017

SMAN 1 Gangga dan beberapa sekolah yang ada di Lombok utara, serta melakukan sosialisasi di masyarakat untuk memberi pengetahuan tentang bahaya Narkoba serta akibat yang ditimbulkan sehingga ada kesadaran dari generasi muda dan para masyarakat untuk menjauhi narkoba tersebut. Sosialisasi ini mengarah kepada sekolah-sekolah dikarenakan pelajar merupakan penerus bangsa yang harus dijaga, dan kenapa harus melakukan sosialisasi ke kalangan pelajar karena pelajar dianggap masih labil dan mudah terpengaruh oleh orang lain dan terpengaruh oleh lingkungan sekitar, maka dari itu dilakukan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan yang dalam tentang bahaya narkoba dan apa saja akibatnya bagi pengguna dan bagi pelakunya. 2). Dilakukannya Pembangunan wawasan anti narkoba dalam rangka mendukung program P4GN, setiap kepala desa yang ada di lomok utara diberi wawasan supaya dapat menyusun program kerja desa terkait bersih dan bebas dari narkoba. Sehingga program tersebut akan dikomplisasi ke tingkat kabupaten sebagai kegiatan bersama dalam pemberantasan narkoba.

Sedangkan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika BNNP NTB melakukan tindakan yang berupa upaya: a). Upaya preventif , Upaya ini dilakukan dengan cara sistematis, berencana dan terarah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika seperti penyuluhan atau memberikan pencerahan terhadap bahaya dan akibat penyalahgunaan Narkotika. Upaya ini biasa lebih sering di terapkan dalam kasus penyalahgunaan Narkotika. Tindakan ini di rasa lebih baik di bandingkan dengan penindakan hukum, karena tidak dapat menyelesaikan persoalan pada intinya.

Dalam upaya preventif ini BNN Provinsi menerapkan strategi Demand Reduction (pengurangan permintaan). Pencegahan ini berupa pencegahan penggunaan dengan metode pendekatan seperti penyuluhan, memasukan program pelajaran dalam pendidikan, terapi rehabilitas serta memberdayakan masyarakat

Selanjutnya adapun program pencegah khusus dalam pendekatan yang dilakukan oleh BNN Provinsi NTB terhadap pelajar di Lombok utara antara lain:⁶

- 1). Dilakukannya pendidikan anti Narkoba pada anak usia dini. Pendidikan ini disesuaikan, karena jangan sampai teori ini malah memberi rasa ingin tahu atau penasaran terhadap anak. Jadi dalam teori pendidikan ini khususnya terhadap anak SD yang telah disesuaikan, baik itu dalam segi penyampaian teori maupun dari segi bahasa.
- 2). Memberikan penyuluhan secara langsung kepada siswa-siswa sekolah yang ada di Lombok utara. Sasaran utama yaitu siswa- siswi yang biasanya dilakukan pada saat masa orientasi yang diisi dengan penyuluhan narkoba dan dilakukan di beberapa sekolah seperti SMPN 3 Tanjung, SMPN 1 Tanjung, SMAN 1 Tanjung, SMKN 1 Tanjung, SMAN 1 Gangga dan SMAN 1 Kayangan dan seokolah yang ada di Lombok utara.
- 3). Dilakukannya peberdayakan masyarakat dalam hal ini kepala desa yang ada di Lombok utara sudah dilatih sebagai kader anti narkoba. Hal ini mengingat bahwa kepala lingkungan merupakan orang pertama dalam struktur organisasi kemasyarakatan. Selain itu tokoh masyarakat dan tokoh agama dijadikan sebagai duta anti narkoba karena sebagai panutan dalam masyarakat dalam melakukan pencegahan narkoba.
- 4). Memasukan kurikulum di mata pelajaran muatan

⁶ Bapak Ifan, selaku kasi pencegahan BNN Provinsi NTB, mataram selasa 21-12-2017

lokal maksudnya adalah di setiap sekolah-sekolah yang ada di Lombok Utara diminta untuk memasukan kurikulum pengetahuan tentang bahaya dan efek dari narkoba sehingga para pelajar lebih tahu tentang bahaya narkoba itu sendiri, hal ini dianggap cara yang baik.

Upaya refresif, yaitu upaya penindakan terhadap gejala-gejala terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan menegakan sanksi pidana terhadap produsen, Bandar, pengedar dan pemakai berdasarkan hukum.

Adapun upaya represif yang dilakukan oleh BNNP NTB antara lain:⁷

Dalam rangka upaya represif ini BNNP atau penindakan setelah melakukan tindak pidana narkoba, BNNP NTB melakukan tindakan melalui seksi pemberantasan yang telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian satuan narkoba yang ada di Polres Lombok utara untuk menindaklanjuti para pelaku. Perbuatan ini juga telah di atur dalam Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi:

“Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Akan tetapi dalam hal ini BNNP NTB dalam melakukan penindakannya lebih condong kepada jaringan pelaku pengedar narkoba walaupun tidak meninggalkan pelaku atau korban, karena di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 pengguna atau pecandu mendapatkan hukuman lebih ringan, namun yang lebih membahayakan adalah adalah pelaku pengedar, karena para pengedar tersebut yang menyebabkan seseorang dapat menyalahgunakan narkoba hingga menjadi kecanduan barang haram tersebut. Sesuai dengan peraturan yang telah tercantum dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba

⁷ Pak Irfan, selaku kasi Pencegahan BNNP NTB, senin 25-12-2017.

berkaitan dengan ketentuan pidana bagi pelaku pengedar narkoba, saat penulis melakukan wawancara dengan salah satu staf BNNP NTB, mengatakan bahwa pemberantasan para pelaku pengedar ini hingga ke akar-akarnya bahkan sampai menyita harta kekayaan yang merupakan hasil dari barang haram tersebut.

Kendala Badan Narkotika Provinsi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakuan Oleh Anak Di Lombok Utara

Kendala yang dihadapi oleh BNNP NTB dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba pada umumnya terkait anggaran dan kurangnya SDM. Seperti dilansir dalam berita harian, budi wasedo selaku kepala BNN menyatakan bahwa saat ini personil BNN hanya mencapai 4.673 orang, seharusnya jumlah ideal personil yang harus dimiliki negara seluas Indonesia harus mencapai 74.000 personil. Mengenai anggaran sesungguhnya tidak bisa disebut nominalnya, tetapi anggaran memang terlalu kecil jika di bandingkan dengan luas wilayah yang harus ditangani.⁸

Kendala yang dihadapi oleh BNNP NTB dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana Narkoba pada umumnya terkait dengan anggaran dan kurangnya SDM. Mengenai anggaran sesungguhnya tidak bisa di sebut nominalnya, tetapi anggaran memang terlalu kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah yang harus ditangani.

⁸ www.koran.sindo.com, Kamis 18-01-2018, kendala BNN

Menurut hasil wawancara pada tanggal 21 desember 2017 dengan Bapak Irfan selaku kasi pencegahan di BNNP NTB, bahwa kendala yang dihadapi dalam melakukan pencegahan Narkotika di Lombok utara yaitu:⁹ a). Komitmen dari pemerintah daerah yang kurang dalam melakukan koordinasi dengan BNNP NTB saat melakukan tes urine kepada para pegawai atau siswa-siswi saat melakukan tes masuk sekolah hanya sebagian sekolah-sekolah yang sudah melakukan kordinasi dan menjalankan sesuai dengan yang di inginkan BNNP NTB seperti SMAN 1 Tanjung, SMKN 1 Tanjung, SMAN 1 Pemenang, SMAN 1 Gangga dan beberapa sekolah yang ada di Lombok utara, sehingga ada masih banyak sekolah lain yang tidak terealisasi untuk melakukan pengeghan dikarenakan koordinasi dengan BNNP masih kurang. b). Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang menyadari tentang bahaya dan efek narkotika khususnya daerah-daerah yang sulit terjangkau atau daerah pelosok dan daerah wisata 3 gili, Gili air, Gili meno, Gili trawangan yang merupakan daerah yang wisatanya dari berbagai negara yang masyarakat dan wisatawanya sangat sulit terkontrol dan disana merupakan jalan keluar masuknya narkotika yang dianggap menjadi sasaran para pengedar. Hal ini membuat kendala BNNP NTB dalam pencegahan Narkotika kurang berjalan seperti apa yang diinginkan. c). Partisipasi Masyarakat di sebagian daerah di Lombok utara masih rendah, kadang masyarakat tidak peduli dengan lingkungan mereka, sehingga apabila di lingkungan diketahui ada yang menggunakan narkotika tidak mau melapor kepada pihak yang berwajib, kondisi seperti inilah yang akan menumbuh kembangkan peredaran gelap narkotika tersebut. Disini BNNP NTB sangat sulit untuk mencari pelaku-pelaku yang

⁹ Pak Irfan, selaku kasi Pencegahan BNNP NTB, senin 25-12-2017.

menyalahgunakan narkoba karna masyarakatnya kadang tidak mau tahu atau takut berurusan dengan aparat penegak hukum.

Kendala BNNP NTB dalam penanggulangan narkoba di Lombok Utara adalah sebagai berikut:¹⁰ a). Kendala dari segi sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Lombok utara, kurangnya personil lapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan sosialisasi dan upaya-upaya lain yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan tersebut dikarenakan di Lombok utara sendiri merupakan wilayah yang sangat jauh BNNP NTB sangat kesulitan untuk menjangkau karna kurangnya fasilitas kendaraan penyuluhan apalagi dengan adanya tempat wisata 3 pulau gili yang membutuhkan kendaraan seperti kapal laut atau speedboat yang mendukung untuk terlaksananya upaya penanggulangan tersebut, b). BNNP NTB juga terkendala oleh SDM Baik secara kualitas maupun kuantitas SDM terbilang masih kurang, mengingat staf penyuluhan hanya satu pegawai dan selebihnya merupakan staf administrasi. Kurangnya personil di lapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dala upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan tersebut kemudian kurangnya tenaga medis, kurangnya fasilitas alat-alat tes dan kurangnya kesadaran masyarakat akan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkoba. c). Selain itu BNNP NTB juga terkendala oleh biaya operasional penyidikan yang sangat besar dan sampai saat ini belum tercukupi. Untuk penyelidikan, waktu yang dibutuhkan

¹⁰ Pak Irfan, selaku kasi Pencegahan BNNP NTB, senin 25-12-2017.

minimal satu bulan dan anggota dilapangan juga membutuhkan biaya makan dan tempat, apalagi mengingat Lombok utara merupakan kabupaten yang sangat jauh membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mencapainya hal ini yang membuat BNNP NTB sangat terkendala dalam melakukan penanggulangan narkotika tersebut.

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar di Lombok Utara maka dapat disimpulkan bahwa: 1). Peran BNN Provinsi dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Lombok Utara yaitu dilakukan upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif yaitu penindakan terhadap gejala-gejala terjadinya penyalahgunaan Narkotika dengan menegakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 yang berlaku dan melaksanakan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat 1 tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dalam lembaga rehabilitasi bagi tersangka, terdakwa dan narapidana. 2). Kendala yang di hadapi BNN Provinsi NTB dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar yaitu komitmen dari pemerintah daerah yang belum terlaksana . serta keterbatasan SDM dirasa menghambat kinerja BNN Provinsi dalam memberantas narkoba dan dalam penerapannya penyidik khusus anak disamakan dengan penyidik orang dewasa sehingga kurang terjaminnya perlakuan yang tepat untuk menjaga psikologis anak.

Saran

Setelah memberikan simpulan, disini penyusun ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut: 1) Agar efektifitas BNN Provinsi semakin meningkat diharapkan kinerja dan pengawasan khususnya terhadap generasi muda lebih ditingkatkan lagi terutama peran keluarga dan masyarakat, selain itu kerja sama BNN Provinsi NTB dengan pemerintah dan aparat penegak hukum haruslah selaras dengan tujuan yang sama, mengingat ancaman narkoba semakin marak pada generasi muda khususnya pada kalangan pelajar yang penuh dengan rasa ingi tahu. 2) Disarankan kepala Badan Narkotika Provinsi NTB dalam melakukan program pencegahan dan penanggulangan narkoba agar jangan hanya fokus pada tindakan penyalahgunaan dan pencegahan narkoba saja, tapi juga harus memperhatikan rangkaian proses tingkahlaku sebelum terjadinya tindakan tersebut. Apalagi mengingat keanekaragaman budaya masyarakat, kita bias memulai dari lingkungan terkecil yaitu tingkat RT, RW untuk meningkatkan sosialisasi sehingga akan lebih mudah dipahami dan di mengerti oleh setiap lapisan masyarakat.

Daftar pustaka

A. BUKU-BUKU

Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung, 1987

Leden Marpaung, *hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

R. Suyoto bakir, *kamus lengkap bahasa Indonesia*, Tangerang; karism Publishing Grup, 2009

Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, bandung, 2012

Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung, 1987

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perpres No 83 tahun 2007, tentang BNN, BNP, BNK.